AKUNTANSI LINGKUNGAN SEBAGAI STRATEGI PENGELOLAAN DAN PENGUNGKAPAN TANGGUNG JAWAB LINGKUNGAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR

Wahyu Mega Pratiwi
Universitas Negeri Surabaya
Email: pratiwi.wahyumega@gmail.com

Abstract

The impact of manufactory activites in our planet is getting worse. Global Warming is the most popular issue in the environmental problem. Environmental accounting is on an expansion path. With increasing social focus on the environment, accounting fills an expectation role, to measure environmental performance. This paper tries to describe about the relationship of environmental accounting as environmental management strategy and disclosure of environmental accountability strategy in order to determine the sustainability of corporate.

Keywords*: manufactory, environtment, accounting*

PENDAHULUAN

Perkonomian modern seperti saat ini, telah memunculkan berbagai isu yang berkaitan dengan lingkungan seperti pemanasan global, ekoefisiensi, dan kegiatan industri lain yang memberi dampak langsung terhadap lingkungan sekitarnya (Agustia, 2010). Menurut Hilman (2007), keadaan lingkungan di dunia termasuk di Indonesia saat ini sudah memprihatinkan, dan salah satu masalah lingkungan hidup dimaksud adalah pemanasan global (*global warming*).

Isu pemanasan global telah menjadi pembahasan yang hangat dibicarakan di berbagai negara. Salah satu sumber penyebab terjadinya pemanasan global yaitu akibat adanya eksploitasi alam yang dilakukan oleh manusia tanpa pertanggungjawaban. Darwin (2007), melihat ada empat hal alasan isu lingkungan semakin signifikan. *Pertama*, ukuran perusahaan yang semakin besar. Semakin

besar perusahaan, diperlukan akuntabilitas yang lebih tinggi dalam pembuatan keputusan berkaitan dengan operasi, produk dan jasa yang dihasilkan. *Kedua*, aktivis dan LSM bidang lingkungan hidup telah tumbuh dengan pesat di seluruh dunia termasuk Indonesia. Mereka akan mengungkap sisi negatif perusahaan yang terkait dengan isu lingkungan hidup dan akan menuntut tanggung jawab atas kerusakan lingkungan atau dampak sosial yang timbul oleh operasi perusahaan. *Ketiga*, reputasi dan citra perusahaan. Perusahaan-perusahaan saat ini menyadari bahwa reputasi, merek, dan citra perusahaan merupakan isu strategis bernilai tinggi dan harus dilindungi. *Keempat*, perkembangan teknologi komunikasi yang sangat cepat. Isu lingkungan dan sosial yang berdampak negatif akan menyebar dan dapat diakses dengan mudahnya menggunakan teknologi informasi.

Industrialisasi semakin bertambah pesat, dan meluas ke seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia. Industrialisasi yang pada mulanya hanya memberikan dampak lingkungan terhadap daerah sekitarnya, saat ini telah menimbulkan dampak lingkungan yang dapat dirasakan di seluruh dunia. Agustia (2010) menyatakan bahwa perusahaan manufaktur di dalam operasinya selain menghasilkan produk, juga menghasilkan limbah. Hal ini disebabkan oleh adanya inefisensi dalam operasi perusahan tersebut. Konsep mengenai pengelolaan lingkungan yang dipahami perusahaan adalah terbatas pada pengelolaan limbah yang dihasikan dari proses produksi, tanpa adanya pertimbangan untuk mengubah proses produksi agar limbah yang dihasilkan dapat dikurangi (Agustia, 2010).

Pada umumnya perusahaan dan organisasi bisnis lainnya hanya menerapkan konsep maksimalisasi laba (salah satu dari konsep yang dianut kaum kapitalis), tetapi pada saat yang sama mereka melanggar konsensus dan prinsip-

prinsip maksimalisasi laba itu sendiri (Suartana, 2010). Konsep ini juga mendorong perusahaan untuk selalu mencari cara agar dapat berproduksi secara efisien. Dampak dari pelanggaran terhadap prinsip-prinsip tersebut diantaranya adalah kurang diperhatikannya program pengelolaan lingkungan dan rendahnya tingkat kinerja lingkungan serta rendahnya minat perusahaan terhadap konservasi lingkungan.

Permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini memunculkan banyak respon dari berbagai pihak untuk melakukan upaya dalam mengatasi kerusakan lingkungan, di antaranya konsumen, *stakeholder*, pemerintah dan pihak terkait dalam lingkungan hidup baik secara independen, nasional maupun internasional seperti *United States Environmental Protection Agency* (US EPA) yang mengeluarkan data *Toxic Inventory* (TRI), *International Organization for Standardization* yang menetapkan ISO 14000, *United Nation* (PBB) melalui *United Nations Environment Programme* (UNEP) dan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC), *Global Reporting Intiative* (GRI) yang mengeluarkan pedoman pelaporan pengungkapan lingkungan sukarela, dan yang lainnya (Fitriyani & Mutmainah, 2011).

Pemerintah di berbagai negara telah membuat berbagai peraturan sebagai upaya untuk mencegah agar bencana alam tidak berlanjut. Begitu pula pemerintah Indonesia, telah menetapkan peraturan berkenaan dengan pencemaran lingkungan. Salah satunya adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 74 aya1 1 hingga 4 menyatakan:

> Perseroan yang menjalankan kegiatan usahannya di bidang dan /atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (2) Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 merupakan kewajiban perseroan

> yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dalam memperhatikan kepatutan dan kewajaran (3) Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Berbagai dampak negatif dari operasi perusahaan, memerlukan suatu sistem akuntansi lingkungan sebagai kontrol terhadap tanggung jawab perusahaan sebab pengelolaan limbah yang dilakukan oleh perusahaan membutuhkan pengukuran, penilaian, pengungkapan, dan pelaporan biaya pengelolaan limbah dari hasil kegiatan operasional perusahaan. Perlakukan terhadap masalah pengelolaan limbah menjadi penting kaitannya sebagai sebuah pengendalian tanggung jawab perusahaan terhadap lingkungannya. pengukuran, penilaian, pengungkapan, dan pelaporan biaya pengelolaan limbah dari hasil kegiatan operasional perusahaan tersebut merupakan salah satu permasalahan akuntansi yang menarik untuk dikaji.

PEMBAHASAN

Perusahaan Manufaktur dan Lingkungan

Perusahaan menghadapi banyak tekanan dalam hal lingkungan dari berbagai tekanan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut. Jenis tekanan tersebut dapat dibedakan menjadi dua kategori, *pertama*, hal-hal yang berkaitan dengan peraturan yang terdiri dari *Global Policy*, Peraturan Pemerintah, Undang Undang Lingkungan Hidup, pengukuran fiskal, serta lembaga lembaga lingkungan. *Kedua*, hal hal yang berkaitan dengan orientasi pasar, seperti pesaing, investor, pelanggan, *stakeholder* serta stokeholder.

Perilaku perusahaan manufaktur terkait dengan tanggung jawab sosial, khususnya lingkungan tercermin dalam pelaporan keuangan yang mereka sajikan. Deegan (2006) dalam Nuswantara (2008) menyatakan bahwa terdapat beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan pertanggung jawaban terhadap lingkungan. *Pertama*, perusahaan akan melakukan tindakan sosial tertentu apabila menurut pandangan menejemen tindakan tersebut mencerminkan ekspektasi lingkungan tempat perusahaan berada. Apabila tindakan tersebut tidak ditempuh oleh perusahaan, hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak taat hukum sehingga memengaruhi dukungan dari lingkungannya yang pada akhirnya akan memengaruhi keberlanjutan perusahaan. *Kedua*, menejemen akan berusaha memenuhi ekspektasi *stakeholder* yang memiliki pengaruh kuat, misalnya pihak yang menguasai sumberdaya langka atau sumberdaya utama yang digunakan dalam kegiatan produksi perusahaan. *Ketiga*, menejemen akan melaksanakan cara atau praktik baru apabila terdapat tekanan dari berbagai institusi. Hal ini disebabkan menejemen khawatir akan kehilangan *stakeholder* utamanya. *Kelima*, menurut teori akuntansi positif, setiap orang didorong oleh kepentingan individunya (*self-interest*). Tindakan sosial dan lingkungan beserta pengungkapannya akan dilaksanakan apabila mengakibatkan implikasi positif terhadap kesejahteraan menejemen yang terlibat.

Keberadaan perusahaan manufaktur di Indonesia dapat membangun sekaligus merusak. Dalam hal pembangunan, dapat menciptakan lapangan kerja baru serta meningkatkan pertumbuhan perekonomian di sekitar daerah perusahaan. Namun, di sisi lain perusahaan juga berpotensi untuk merusak lingkungan jika tidak dikelola dengan baik (Fitriyani & Mutmainah, 2011).

Selama ini perusahaan dianggap sebagai lembaga yang dapat memberikan banyak keuntungan bagi masyarakat, perusahaan harus memaksimalkan labanya agar dapat memberikan sumbangan yang maksimum kepada masyarakat. Namun seiring dengan perjalanan waktu, masyarakat semakin menyadari bahwa muncul dampak-dampak sosial dan lingkungan yang disebabkan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya untuk mencapai laba yang maksimal, yang semakin besar dan semakin sulit untuk dikendalikan. Oleh karena itu, masyarakat pun menuntut agar perusahaan senantiasa memperhatikan dampak-dampak sosial yang ditimbulkannya dan berupaya mengatasinya.

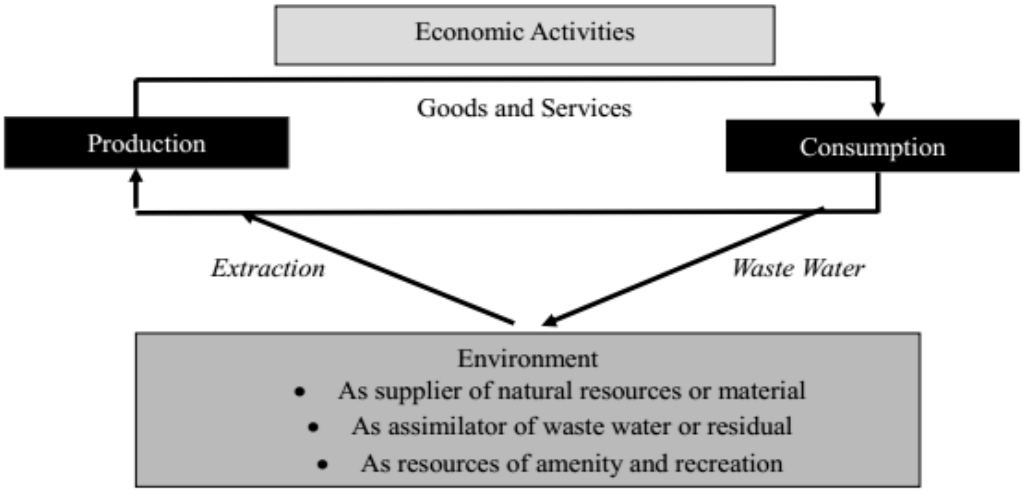

Gambar 1. Interaksi Aktivitas Ekonomi dan Lingkungan
Sumber : Idris. 2012. Akuntansi Lingkungan Sebagai Instrumen Pengungkapan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan di *Era Green Market.*

Pada Gambar 1 terlihat bahwa dalam ekonomi terdapat dua kegiatan pokok, yaitu produksi dan konsumsi barang dan jasa. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang dan jasa, sedangkan konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang dan jasa tersebut. Kegiatan produksi dan konsumsi tersebut berlangsung dalam lingkungan alami (*Natural environment*). Lingkungan menyediakan sumberdaya (*resources*) berupa bahan mentah (*raw material*) yang

akan ditransformasi melalui kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari kegiatan produksi dan konsumsi tersebut dihasilkan limbah atau residual baik dalam bentuk padat, cair, maupun gas kemudian akan kembali ke lingkungan.

Akuntansi Lingkungan

Isu lingkungan global mengalami perkembangan pesat yang berimplikasi pada perubahan kebutuhan para *stakeholder*. Hal tersebut menuntut akuntansi harus mampu menyajikan informasi yang sesuai dengan kebutuhan *stakeholder* s. Dalam kaitannya dengan tuntutan tersebut, akuntansi juga telah mengalami perkembangan yang pesat sehingga dikenal ada akuntansi keuangan konvensional dan akuntansi lingkungan (Idris, 2012).

Konsep akuntansi lingkungan mulai berkembang sejak tahun 1970-an di Eropa. Hal ini terjadi akibat dari tekanan lembaga-lembaga bukan pemerintah dan meningkatnya kesadaran lingkungan di kalangan masyarakat yang mendesak agar perusahaan-perusahaan menerapkan pengelolaan lingkungan bukan hanya kegiatan industri demi bisnis saja karena pada saat itu perusahaan-perusahaan hanya berorientasi laba yang tinggi (Agustia, 2010). Tujuan dari akuntansi lingkungan sebagai sebuah alat manajemen lingkungan dan sebagai alat komunikasi dengan masyarakat adalah untuk meningkatkan jumlah informasi relevan yang dibuat bagi mereka yang memerlukan atau dapat menggunakannya (Idris, 2012). Hal tersebut untuk mengetahui kegiatan perusahaan dalam upaya menangani pencemaran lingkungan sertak kewajiban perusahaan atas masalah tersebut melalui laporan keuangan perusahaan.

Akuntansi lingkungan adalah suatu istilah yang berupaya untuk mengelompokkan pembiayaan yang dilakukan perusahaan dan pemerintah dalam melaukan konservasi lingkungan ke dalam pos lingkungan dan praktik binis perusahaan (Suartana, 2010). Akuntansi lingkungan juga dapat dianalogikan sebagai suatu kerangka kerja pengukuran yang kuantitatif terhadap kegiatan konservasi lingkungan yang dilakukan perusahaan (Suartana, 2010).

Ada berbagai macam pendekatan dalam Akuntansi Lingkungan pada tingkat mikro atau perusahaan, antara lain akuntansi pengelolaan lingkungan, akuntansi energi dan bahan baku, pelaporan keuangan dan laporan pertanggunggjawaban sosial. Akuntansi lingkungan merupakan salah satu bagian ilmu bidang akuntansi. Akuntansi Lingkungan memberikan laporan bagi pihak internal dan eksternal perushaan.

Penggunaan internal Akuntansi Lingkungan menghasilkan informasi lingkungan untuk membantu membuat keputusan manajemen mengenai tingkat harga, pengendalian overhead pabrik, dan penganggaran modal. Informasi tersebut disajikan Akuntansi Pengelolaan Lingkungan. Penggunaan internal lebih baik disebut dengan akuntansi manajemen lingkungan (Bartolomeo, *et al*. , 2000 dalam Yakhou & Dorweiler, 2004). Sedangkan untuk kepentingan eksternal, Akuntansi Lingkungan mengungkapkan informasi lingkungan untuk kepentingan publik dan masyarakat keuangan lainnya. Informasi tersebut disajikan dalam Laporan Keuangan Perusahaan (Akuntansi Keuangan Lingkungan). Baik penggunaan internal maupun penggunaan eksternal, informasi yang diberikan disajikan dalam bentuk data keuangan.

Menurut Hamid (2002) dalam Agustia (2010), pada tingkat mikro atau tingkat perusahaan, Akuntansi Lingkungan memiliki perananan penting dalam upaya perusahaan manufaktur untuk melaksanakan kegiatan pelestarian lingkungan. Akuntansi lingkungan memberikan peran dalam tiga perwujudan akuntansi, *pertama* akuntansi keuangan, akuntansi lingkungan berperan untuk memberikan tambahan informasi melalui pengungkapan (*disclosure*) wajar atau dalam data kuantitatif pada komponen laporan keuangan yang diterbitkan secara berkala serta menunjukkan kegiatan dan hasil operasional perusahaan yang mencakup dimensi ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Kedua*, Akuntansi Biaya, akuntansi lingkungan digunakan untuk alokasi biaya yang wajar dan pengendalian segala aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan perusahaan. *Ketiga*, Akuntansi Manjemen, akuntansi lingkungan berperan dalam pengambilan keputusan manajemen.

Akuntansi Lingkungan Sebagai Strategi Pengelolaan Lingkungan

Pengelolaan lingkungan dalam bisnis telah berkembang dari waktu ke waktu dengan pemahaman lingkungan yang lebih baik terkait keuangan, biaya dan manfaat sebagai input untuk akuntansi manajemen konvensional. Stimulus utamanya adalah pada faktor yang terkait dengan lingkungan yang dapat meningkatkan profitabilitas dan posisi keuangan perusahaan (Ismail *et al*., 2007). Akuntansi Lingkungan digunakan untuk menilai biaya lingkungan penuh yang terkait dengan kegiatan produksi dan produk, proses, input berupa bahan baku, energi, air, dan output berupa produk polusi, limbah air, dan limbah

tanah. Akuntansi lingkungan juga dapat digunakan untuk melacak kinerja lingkungan organisasi agar lebih terukur.

Di masa lalu, sistem akuntansi lingkungan yang digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi lingkungan dan mengungkapkan efek dari pengurangan dampak lingkungan adalah metode biaya konservasi. Namun, dalam kenyataannya bisnis telah berkembang, misalnya, biaya internal yang terkait dengan emisi udara ke lingkungan sering tidak diidentifikasi dalam praktik manajemen konvensional. Akibatnya, biaya penghematan yang berkaitan dengan tekanan lingkungan sering tetap tersembunyi. Inilah yang disebut dengan biaya yang sulit untuk dideteksi, tetapi biaya ini sering menjadi signifikan (Pernilla, 2001, dalam Ismail *et al*., 2007).

Penghematan biaya dicapai melalui konservasi energi dan minimalisasi limbah. Penghematan ini, yang meningkatkan profitabilitas, yang dihasilkan oleh produksi dan disiplin ilmu teknik. Sebagai contoh, kontribusi dari manajemen strategis spesialis dan keahlian teknis yang diperlukan untuk mengatasi masalah produk daur ulang dan *re-engineering* akan bersama-sama diperlukan dalam pengembangan strategi untuk mengurangi dampak kegiatan perusahaan manufaktur terhadap lingkungan.

Sebagian besar perusahaan telah mengakui keunggulannya dalam prinsip menemukan cara dalam pencegahan polusi dengan sistem pengelolaan lingkungan dalam proses pengambilan keputusan yang terkait dengan lingkungan. Hal tersebut diperlukan sebagai alat untuk mengukur dan mengevaluasi keuntungan yang diperoleh dari kegiatan bisnis dan lingkungan dari dalam internal perusahaan.

Pengelolaan lingkungan diperlukan untuk mengukur dan mengidentifikasi dampak biaya lingkungan yang dihasilkan dalam semua proses yang relevan (dampak lingkungan potensial) seperti emisi udara, pembuangan limbah, dan limbah air. Perusahaan-perusahaan perlu mengidentifikasi dampak lingkungan yang potensial dan pengaruhnya dalam setiap proses dan mengevaluasi sumber daya manajerial yang dialokasikan dengan tepat untuk pengaruh lingkungan (Ismail *et al*., 2007).

Pengelolaan Lingkungan dengan Akuntansi Manajemen Lingkungan

Akuntansi Manajemen Lingkungan didefinisikan sebagai turunan, analisis, dan penggunaan dari informasi keuangan dan non keuangan, untuk membantu manajemen dalam perusahaan (Bartolomeo, *et al.*, 2000 dalam dalam Yakhou & Dorweiler, 2004). Akuntansi Manajemen Lingkungan (*Environmental Management Accounting*) merupakan salah satu sub sistem dari akuntansi lingkungan yang menjelaskan sejumlah persoalan mengenai persoalan penguantifikasian dampak-dampak bisnis perusahaan ke dalam sejumlah unit moneter (Rustika, 2011). EMA (*Environmental Management Accounting*) mengintegrasikan lingkungan perusahaan dan kebijakan bisnis, dengan demikian dapat membantu memberikan panduan untuk membangun bisnis yang berkelanjutan (Yakhou & Dorweiler, 2004).

EMA adalah teknik yang menekankan efisiensi dan efektifitas dalam penggunaan sumber daya dan merupakan bagian dari sistem pengendalian manajemen yang lebih luas (Rustika, 2011). Informasi pertama yang disajikan dari penerapan akuntansi manajemen lingkungan adalah mengungkapan mengenai

informasi fisik atas penggunaan, aliran dan tujuan akhir dari energi, air dan bahan baku termasuk limbah. Sedangkan informasi kedua yaitu mengenai informasi moneter atas lingkungan, terkait dengan biaya, laba dan penghematan. Informasi yang disediakan untuk jenis perusahaan manufaktur adalah informasi moneter. Akuntansi moneter (*monetary accounting*) ditujukan untuk memberikan informasi dampak moneter atas penggunaan bahan dan produk keluaran yang dihasilkan dalam proses produksi atau pemberian jasa yang dilakukan perusahaan manufaktur.

Akuntansi manajemen lingkungan mengembangkan biaya-biaya yang harus ditanggung perusahaan sebagai upaya untuk mengendalikan dan mencegah limbah dan polusi yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan manusia, misalnya, biaya-biaya yang terjadi untuk mencegah dihasilkannya limbah atau polusi, biaya pengendalian dan daur ulang limbah yang dihasilkan, serta biaya untuk memulihkan wilayah yang terkena polusi (Rustika, 2011).

EMA adalah kerangka yang komprehensif dalam membahas akuntansi lingkungan. Dalam hubungannya dengan akuntansi lingkungan, ada konsensus utama yaitu dampak lingkungan terhadap finansial perusahaan dalam bentuk *monetary environmental information* (MEMA) yaitu semua dampak masa lalu, sekarang dan pada waktu yang akan datang dari aliran uang, serta dampak lingkungan terhadap sistem lingkungan dalam *physical environmental information* (PEMA) termasuk semua material dan energi yang dikeluarkan pada masa lalu, sekarang dan pada waktu yang akan datang yang mempengaruhi sistem ekologi.

Akuntansi Lingkungan Sebagai Strategi Pengungkapan Tanggung Jawab Lingkungan

Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan biasanya dicatatkan dalam suatu laporan yang dapat dilaporkan secara terpisah maupun digabung dalam laporan tahunan. Akuntansi Keuangan dan penyajian informasi dalam laporan keuangan dapat dilakukan dengan cara memberikan tambahan informasi melalui pengungkapan (*disclosure*) atau dalam data kuantitatif pada komponen laporan keuangan. Menurut *American Institute of Certifie Public Accountants* (AICPA) dalam Idris (2011), akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, dan peringkasan transaksi dan kejadian yang bersifat keuangan dengan cara yang berdaya guna dan dalam bentuk satuan uang, dan penginterpretasian hasil proses tersebut.

Kegiatan akuntansi menghasilkan informasi tentang suatu perusahaan dalam bentuk laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban manajemen kepada pemilik perusahaan dan masukan penting dan relevan dalam pengambilan keputusan ekonomik. Laporan keuangan tersebut harus disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan.

Berdasarkan UU No. 23 tahun 1997 mengenai Pengelolaan Lingkungan Hidup beserta peraturan pelaksanaannya, kinerja pengelolaan lingkungan wajib diungkapkan dan disampaikan oleh setiap orang/penanggung-jawab kegiatan. Pada umumnya informasi yang disampaikan kepada umum hanyalah AMDAL dan pengendalian pencemaran udara, sedangkan informasi kinerja pengelolaan lingkungan lainnya secara rinci hanya disampaikan kepada instansi lingkungan hidup. Sehingga bagi masyarakat yang ingin mengetahuinya harus mengakses sendiri (Nuswantara, 2008).

Pengungkapan pertanggungjawaban lingkungan dalam pengungkapan *Corporate Social Responsibilty* (CSR) merupakan suatu proses penyediaan informasi yang dirancang untuk mengemukakan masalah seputar *social and environmental accountability*, yang mana secara khas tindakan ini dapat dipertanggungjawabkan dalam media-media seperti laporan tahunan maupun dalam bentuk iklan yang berorientasi sosial (Fitriyani & Mutmainah, 2011).

Pengungkapan CSR merupakan pengungkapan suatu informasi mengenai aktivitas sosial yang dilakukan perusahaan yang diharapkan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perusahaan dan mempengaruhi kinerja finansial perusahaan. Tujuan pengungkapan dikategorikan menurut *Securities Exchange Commission* (SEC) menjadi dua, yaitu *protective disclosure* sebagai upaya perlindungan terhadap investor dan *informative disclosure* yang bertujuan memberikan informasi yang layak kepada pengguna laporan (Utomo, 2000 dalam Fitriyani & Mutmainah, 2011). Selain itu tujuan pengungkapan berkaitan dengan akuntansi pertanggungjawaban sosial adalah menyediakan informasi yang memungkinkan dilakukan evaluasi pengaruh perusahaan terhadap masyarakat.

Ada dua jenis pengungkapan dalam laporan keuangan, antara lain pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*), yaitu informasi yang harus diungkapkan oleh emiten yang diatur oleh peraturan pasar modal di suatu negara dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*), yaitu pengungkapan yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh standar yang ada. Pengungkapan sosial di Indonesia termasuk dalam kategori pengungkapan sukarela.

Beberapa perusahaan besar, terutama yang sudah tercatat di pasar modal serta mempunyai dampak langsung terhadap lingkungan, telah mengungkapkan kinerja pengelolaan lingkungannya secara sukarela (Nuswantara, 2008). Di samping itu laporan kinerja pengelolaan lingkungan yang disampaikan perusahaan kepada instansi lingkungan saat ini hanya berupa laporan penaatan (*Compliance Report*) dengan format dan istilah yang sulit dimengerti oleh orang awam maupun oleh pihak yang berprofesi nonlingkungan. Oleh karena itu, diperlukan informasi kinerja ketaatan pengelolaan lingkungan yang informatif kepada publik.

Sistem akuntansi di sebuah negara umumnya dikembangkan oleh profesi. Ikatan Akuntan Indonesia contohnya, merupakan badan profesi yang mengembangkan standar di Indonesia. Meskipun demikian profesi bukanlah satu-satunya pihak yang mengembangkan standar akuntansi. Seperti yang ada di Amerika, FASB sebagai badan penyusun standar terdiri atas beberapa pihak, yaitu AICPA (*American Institute of Certified Public Accountants*), *Financial Accounting Foundation* (FAF) dan juga *Financial Accounting Standards Advisory Council* (FASAC).

Pelaporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia diatur oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) yang menyarankan kepada perusahaan untuk mengungkapkan tanggung jawab mengenai sosial dan lingkungan sebagaimana tertulis pada Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) no 1 (Revisi 2009) paragraf 12 berbunyi:

> Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan

> sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar lingkup Standar Akuntansi Keuangan.

Dari sisi standar akuntansi, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK IAI) memutuskan untuk merevisi PSAK 33 (1994) tentang Akuntansi Pertambangan Umum dalam rangka proses konvergensi IFRS di Indonesia. PSAK 33 (1994) tentang Akuntansi Pertambangan Umum direvisi menjadi PSAK 33 (revisi 2011) tentang Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pertambangan Umum. Ruang lingkup PSAK 33 (revisi 2011) tentang Aktivitas Pengupasan Lapisan Tanah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pada Pertambangan Umum diantaranya mengatur perlakuan akuntansi atas aktivitas pengelolaan lingkungan hidup.

Pada tanggal pelaporan, jumlah provisi pengelolaan lingkungan hidup harus dievaluasi kembali untuk menentukan apakah jumlah akrualnya telah memadai. Jika jumlah pengeluaran pengelolaan lingkungan hidup yang sesungguhnya terjadi pada tahun berjalan sehubungan dengan kegiatan periode lalu lebih besar daripada jumlah aktual yang telah dibentuk, maka selisihnya dibebankan ke periode di mana kelebihan tersebut timbul.

Menurut Yanto (2007), ada beberapa cara untuk mengungkapan informasi pertanggungjawaban lingkungan. *Pertama*, penyajian informasi lingkungan melalui ”pengungkapan” dapat dilakukan dengan membuat ikhtisar kegiatan perusahaan terkait dengan upaya-upaya untuk melestarikan lingkungan, hasil penilaian pihak independen terkait dengan kepatuhan entitas terhadap kelestarian lingkungan. *Kedua*, pelaporan tanggung jawab atas lingkungan juga dapat disajikan dalam laporan keuangan inti, misalnya, peralatan yang disediakan dalam

rangka untuk mengurangi pencemaran lingkungan dapat disajikan sebagai aset tetap. PSAK 16 (revisi 2007) tentang Aset Tetap paragraf 11 menyatakan,

> Aset tetap dapat diperoleh untuk alasan keamanan atau lingkungan. Perolehan aset tetap semacam itu, di mana tidak secara langsung meningkatkan manfaat ekonomik masa depan dari suatu aset tetap yang ada, mungkin diperlukan bagi entitas untuk memperoleh manfaat ekonomik masa depan dari aset yang lain.

Ketiga, biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka untuk mencegah, lingkungan dari pencemaran dapat diakui sebagai beban dalam laporan laba rugi. Selain itu, PSAK 57 tentang Kewajiban Diestimasi, Kewajiban Kontinjensi dan Aset Kontinjensi, juga memungkinkan untuk mengakui beban sebelum dikeluarkannya biaya, dalam rangka memenuhi ketentuan hukum atau aspek konstruktif lainnya. Berdasarkan uraian tersebut, menunjukkan bahwa ketentuan akuntansi yang diatur dalam Standar Akuntansi Keuangan yang ada saat ini sudah memberikan pengaturan yang relatif jelas mengenai cara menyajikan informasi kepedulian lingkungan dalam laporan keuangan.

SIMPULAN

1. Akuntansi lingkungan sebagai strategi pengelolaan lingkungan yang menggunakan alat manajemen lingkungan dapat diterapkan dalam upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur. Melalui akuntansi manajemen lingkungan perusahaan dapat memperoleh informasi mengenai penggunaan sumber daya alam dan dampaknya terhadap lingkungan serta informasi moneter mengenai biaya yang digunakan untuk upaya konservasi lingkungan. Jika hal ini dapat

dilaksanakan, maka kondisi lingkungan yang mulai mengalami kerusakan dan penurunan kualitas dapat dicegah dan dilestarikan, sehingga terdapat perbaikan atas pengurangan kualitas yang terjadi.

2. Akuntansi Lingkungan sebagai strategi pengungkapan tanggung jawab lingkungan, merupakan instrumen yang menyajikan informasi yang mengungkapan bentuk pertanggungjawaban perusahaan berupa butir butir kegiatan konservasi lingkungan dan kegiatan sosial lainnya. Pengungkapan pertanggungjawaban lingkungan dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap citra perusahaan dan mempengaruhi kinerja finansial perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

Agustia, Dian. 2010. Pelaporan Biaya Lingkungan Sebagai Alat Bantu Bagi Pengambilan Keputusan yang Berkaitan Dengan Pengelolaan Lingkungan. *Jurnal Akuntansi: Akrual*. Vol.1, No.2, April 2010: 80-100.

Darwin, Ali. (2007, November). Pentingnya Laporan Keberlanjutan. *Akuntan Indonesia, (online).* Edisi No.3. Halaman 12-14. www.iaiglobal.or.id/data/referensi/ai_edisi_03.pdf (diakses 10 April 2013).

Fitriyani & Siti Mutmainah. 2011. *Keterkaitan Kinerja Lingkungan, Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) dan Kinerja Finansial.* Skripsi, (online). Semarang: UNDIP. http://eprints.undip.ac.id/35522/1/Skripsi_30.pdf (diakses 10 April 2013).

Hilman, Masnellyarti. (2007, November). Lingkungan Kita Memprihatinkan. *Akuntan Indonesia, (online).* Edisi No.3. Halaman 16-19. www.iaiglobal.or.id/data/referensi/ai_edisi_03.pdf (diakses 10 April 2013).

Idris, 2012. Akuntansi Lingkungan Sebagai Instrumen Pengungkapan Tanggung Jawab Perusahaan Terhadap Lingkungan di Era Green Market. *Jurnal Economac, (online)*. Vol.2, No.2. http://manajemen.unnes.ac.id (diakses 9 Mei 2013).

Ismail, M., A, Seetharaman, & Saravanan. 2007. Environmental Accounting as a Tool for Environmental Management System. *Jasem, (online).* Vol. 11(2). Juni 2007: 137-145. http://www.bioline.org.br/pdf?ja07038. (diakses 12 Mei 2013).

Nuswantara, Dian Anita. 2008. Akuntansi Lingkungan: Antara Mandatory dan Voluntary. *Jurnal Pelangi Ilmu, (online).* Vol.2, No.2, Juli-Desember 2008. http://pelangiilmu.jurnal.unesa.ac.id/bank/jurnal/AKUNTANSI_LINGKUNGAN_paper_CFP_JEBI_(Dian_Anita_Nuswantara)-Ready.pdf (diakses 26 Februari 2013).

Rustika, Novia. 2011. *Analisis Pengaruh Penerapan Akuntansi Manajemen Lingkungan dan Strategi Terhadap Inovasi Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdapat di Jawa Tengah).* Skripsi, (online). Semarang: UNDIP. http://eprints.undip.ac.id (diakses 16 April 2013).

Suartana, I Wayan. 2010. Akuntansi Lingkungan dan *Tripple Bottom Line Accounting*: Paradigma Baru Akuntansi Bernilai Tambah. *Jurnal Bumi Lestari, (online).* Vol.10, No.1, Februari 2010: 105 - 112. http://ojs.unud.ac.id/index.php/blje/article/download/112/95 (diakses 10 April 2013).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Yakhou, Mehenna & Vernon P. Dorweiler. 2004. Environmental Accounting: An Essential Component of Business Strategy. *Bus. Strat. Env., (online). Vol.13. 2004: 65-77.* http://www.ebtekarnovin.com/Editor/UploadFiles/PDF%20Articles /accounting1.pdf (diakses 1 Mei 2013).

Yanto, Sri. (2007, November). Akuntansi Hijau: Sarana Pendeteksi Dini Bencana Lingkungan. *Akuntan Indonesia, (online).* Edisi No.3. Halaman 23-26. www.iaiglobal.or.id/data/referensi/ai_edisi_03.pdf (diakses 10 April 2013).